

ANALISIS PERENCANAAN ANGGARAN BERBASIS KINERJA DAN PELAKSANAAN ANGGARAN BERBASIS KINERJA DAN EVALUASI PELAPORAN TERHADAP AKUNTABILITAS KINERJA (STUDI KASUS PADA BADAN KARANTINA PERTANIAN JAKARTA)

Ningrum Ferniyanti¹, Suratno², Edy Supriyadi³

¹Kementrian Pertanian

^{2,4} Sekolah Pascasarjana Universitas Pancasila
ningrum@gmail.com

ABSTRACT

The aims of this study are to determine and empirically prove the effect of performance-based budget planning on performance accountability, the effect of implementation of clinic-based budgeting on performance accountability, and the effect of budget evaluation on performance accountability. Based on the results of research conducted, it can be concluded that there is no influence in budget planning on performance accountability because there are problems encountered so far, namely partial budget planning prepared by directorate staff who do not understand or are not budget planners so that budget revisions are made repeatedly causing budget execution to stall. The influence of the implementation of the budget on performance accountability. This proves that the better the implementation of the budget, the better performance accountability so that the output to be achieved will be achieved properly. The problems faced so far are the implementation of the budget that lacks understanding of the government's financial system, procurement procedures and mechanisms that are always changing, and government regulations that always change in the middle of the current budget year. The influence of the evaluation of reporting on performance accountability. This proves that the better the Reporting Evaluation, the better the accountability of performance so that the output to be achieved will be achieved properly.

Key words:

budget planning, implementation of clinic-based budgeting, budget evaluation and performance accountability

ABSTRAK

Penelitian bertujuan untuk menguji dan membuktikan secara empiris Pengaruh perencanaan anggaran berbasis kinerja terhadap akuntabilitas kinerja, Pengaruh pelaksanaan anggaran berbasis kinerja terhadap akuntabilitas kinerja, dan Pengaruh evaluasi anggaran terhadap akuntabilitas kinerja. Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan, dapat disimpulkan bahwa Tidak ada pengaruh dalam perencanaan anggaran terhadap akuntabilitas kinerja disebabkan terdapat permasalahan yang dihadapi selama ini yaitu perencanaan anggaran sebagian yang di susun oleh staf direktorat yang tidak faham atau bukan tenaga perencana anggaran sehingga revisi anggaran yang dilakukan berulang kali menyebabkan pelaksanaan anggaran tersendat. Adanya pengaruh pelaksanaan anggaran terhadap akuntabilitas kinerja. Hal ini membuktikan semakin baik pelaksanaan anggaran maka akan semakin baik akuntabilitas kinerja sehingga output yang ingin dicapai akan tercapai dengan baik. Permasalahan yang dihadapi selama ini adalah pelaksanaan anggaran yang kurang memahami sistem keuangan pemerintah, prosedur dan mekanisme pengadaan yang selalu berubah, dan peraturan pemerintah yang selalu berubah di pertengahan tahun anggaran berjalan. Adanya pengaruh Evaluasi pelaporan terhadap akuntabilitas kinerja. Hal ini membuktikan semakin baik Evaluasi Pelaporan maka akan semakin baik akuntabilitas kinerja sehingga output yang ingin dicapai akan tercapai dengan baik.

PENDAHULUAN

Seiring dengan semakin banyaknya tuntutan masyarakat terhadap sektor publik, Badan Karantina Pertanian/BARANTAN sebagai salah satu lembaga pemerintahan dituntut lebih baik dalam bekerja, tidak hanya dari sisi pelaksanaan anggaran namun juga kinerja kementerian, yang terjadi di BARANTAN dalam menyusun anggaran masih terdapat beberapa permasalahan sehingga anggaran tidak dapat terealisasi dengan baik dan maksimal, tentunya ini menyebabkan kinerja Kementerian juga akan tidak baik. Pelaksanaan anggaran yang menumpuk pada semester-semester akhir menjadi permasalahan utama, sehingga Akuntabilitas kinerja menjadi masalah utama juga. Telah banyak penelitian yang dilakukan berkaitan dengan hal ini beberapa diantaranya adalah penelitian yang dilakukan oleh Husein Mahmoedi, Nunung nurhayati dkk dimana semua membahas variable yang mempengaruhi akuntabilitas kinerja.

Perwujudan good governance merupakan persyaratan bagi Pemerintah dalam mewujudkan aspirasi masyarakat dalam rangka meningkatkan kesejahteraan, untuk itu diperlukan pengembangan dan penerapan sistem pertanggung jawaban yang tepat, jelas dan legitimate sehingga Pemerintah yang berjalan akan jauh dari korupsi, kolusi dan nepotisme sehingga Pemerintah bersih dan bertanggungjawab.

Seperti dalam artikel tentang Akuntabilitas yang ditulis oleh Bahrullah Akbar dan Siti Nurbaya mengatakan bahwa "Dalam pengertian pertanggungjawaban demikian, Akuntabilitas mempunyai suatu kewajiban pejabat pemerintah kepada rakyat dimana public mempunyai hak untuk melakukan suatu "correction" atas tindakan-tindakan yang diambil oleh penguasa. Ini merupakan bahwa selain memberikan pertanggungjawaban juga harus diminta tanggung jawabnya ".

Fenomena yang terjadi dalam perkembangan sektor public di Indonesia saat ini adalah menguatnya tuntutan Akuntabilitas atas lembaga-lembaga publik. Akuntabilitas dapat diartikan sebagai kewajiban-kewajiban dari individu-individu atau penguasa yang dipercaya untuk mengelola sumber daya publik dan yang bersangkutan dengannya untuk dapat menjawab hal-hal yang menyangkut pertanggung- jawabannya. Akuntabilitas terkait erat dalam instrumen untuk kegiatan control terutama dalam hal pencapaian hasil pada pelayanan public dan menyampaikannya secara transparan kepada masyarakat. Sehingga Akuntabilitas diharapkan dapat berjalan dengan baik sesuai dengan tujuan pembangunan yang telah ditetapkan. Pengertian Akuntabilitas ini memberikan suatu petunjuk sasaran pada hampir semua reformasi sektor public dan mendorong pada munculnya tekanan untuk perilaku kunci yang terlibat untuk bertanggungjawab dan untuk menjamin kinerja pelayanan publik.

Prinsip Akuntabilitas adalah merupakan pelaksanaan pertanggungjawaban dimana dalam kegiatan yang dilakukan oleh pihak yang terkait harus mampu mempertanggungjawabkan pelaksanaan kewenangan yang diberikan dibidang tugasnya. Prinsip Akuntabilitas terutama berkaitan erat dengan pertanggungjawaban terhadap efektivitas kegiatan dalam mencapai sasaran atau target kebijakan dan program yang telah ditetapkan. Aspek yang terkandung dalam pengertian akuntabilitas adalah bahwa public mempunyai hak untuk mengetahui kebijakan-kebijakan yang diambil oleh semua pihak yang telah mereka beri kepercayaan.

Anggaran berbasis kinerja walaupun telah dilaksanakan oleh seluruh Kementerian di Indonesia namun pada pelaksanaannya masih terdapat banyak kendala. BAdan Karantina Pertanian sebagai salah satu lembaga pemerintah yang telah melaksanakan Anggaran Berbasis Kinerja ini juga memiliki banyak kendala sehingga anggaran tidak terealisasi dengan maksimal dan tidak sesuai dengan perencanaan yang telah ditetapkan sehingga penyerapan anggaran menumpuk pada setiap akhir tahunnya. Penggunaan belanja tidak sesuai dengan program dan kegiatan , hal ini berpengaruh terhadap output/outcome yang tidak tercapai sesuai rencana dalam program kerja kementerian/ lembaga. Realisasi anggaran setiap bulannya tidak mencerminkan dengan rencana penyerapan anggaran yang telah ditetapkan. Penyerapan anggaran menumpuk pada setiap akhir tahun anggaran. Penyerapan tidak merata setiap triwulan menyebabkan fungsi APBN tidak maksimal tau dengan kata lain program pemerintah tercapai namun belum maksimal.

Pokok Permasalahan

Berdasarkan latar belakang masalah dan identifikasi masalah di atas, maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah :

1. Apakah terdapat pengaruh antara perencanaan anggaran berbasis kinerja terhadap akuntabilitas kinerja?
2. Apakah terdapat pengaruh pelaksanaan anggaran berbasis kinerja terhadap akuntabilitas kinerja?
3. Apakah terdapat pengaruh evaluasi pelaporan anggaran terhadap akuntabilitas kinerja.

TINJUAN PUSTAKA

Telaah Teori dan Pengembangan Hipotesis

Akuntabilitas adalah bentuk kewajiban penyelenggara kegiatan public untuk dapat menjelaskan dan menjawab segala hal yang menyangkut langkah dari seluruh keputusan dan proses yang dilakukan, serta pertanggung-jawaban terhadap hasil kinerjanya (Penny Kusumastuti Lukita: 2014:2)

Akuntabilitas public adalah kewajiban pihak pemegang amanah (agent) untuk memberikan pertanggungjawaban, menyajikan, melaporkan dan mengungkapkan segala aktivitas dan kegiatan menjadi tanggungjawabnya kepada pihak pemberi amanah yang memiliki hak dan kewenangan untuk meminta pertanggung-jawaban tersebut (Mardiasmo, 2002:21)

Keberhasilan suatu organisasi dipengaruhi oleh kinerja sumber daya manusianya, oleh karena itu setiap perusahaan atau organisasi atau lembaga akan berusaha untuk meningkatkan kinerja pegawai dalam mencapai tujuan organisasi yang telah ditetapkan. Budaya organisasi yang tumbuh dan terpelihara dengan baik akan memacu organisasi kearah perkembangan yang lebih baik. Disisi lain, kemampuan pemimpin dalam menggerakkan dan memberdayakan pegawainya akan mempengaruhi kinerja. Istilah kinerja dari kata Job performance atau actual performance (prestasi kerja atau prestasi sesungguhnya yang dicapai oleh seseorang) Prestasi kerja pada umumnya dipengaruhi oleh kecakapan, ketrampilan, pengalaman dan kesungguhan kerja dari tenaga kerja yang bersangkutan.

Hasibuan (2002:160) " Kinerja adalah hasil kerja yang dicapai seseorang dalam melaksanakan tugas-tugasnya atas kecakapan, usaha dan kesempatan. Berdasarkan paparan diatas kinerja adalah suatu hasil yang dicapai seseorang dalam melaksanakan tugas-tugas yang didasarkan atas kecakapan, pengalaman dan kesungguhan serta waktu menurut standar dan kriteria yang telah ditetapkan sebelumnya".

Sedangkan Ikhsan (2009:173), memberikan pendapatnya mengenai anggaran : " Anggaran merupakan perencanaan manajerial untuk melakukan suatu tindakan dalam ungkapan-ungkapan keuangan. Anggaran merupakan istilah singkat dari perencanaan laba yang terpadu dan meliputi pilihan-pilihan manajemen dan tujuan-tujuan terhadap organisasi dan penyediaan dana sebagai salah satu acuan dalam menjalankan operasional sehari-hari".

Dari definisi tersebut dapat disimpulkan bahwa secara umum anggaran merupakan suatu rencana kerja yang disusun secara sistematis yang dinyatakan dalam satuan uang, barang atau jasa untuk waktu periode yang akan datang

Semua unit organisasi, apakah dipilih atau ditunjuk, dikatakan akuntabel ketika mereka mampu menjelaskan dan mempertanggung-jawabkan semua tindakan/kegiatan yang mereka lakukan, dan menerima sanksi untuk tindakan yang tidak layak (tidak dapat dipertanggung-jawabkan) (Pusdiklawas BPKP,2011:11), sehingga akuntabilitas kinerja dapat diukur meliputi beberapa tahap, yaitu perencanaan, pengukuran kinerja, evaluasi dan pelaporan/LAKIP. Siklus akuntabilitas kinerja instansi pemerintah digambarkan sebagai berikut :



Gambar 1 Siklus Akuntabilitas Kinerja Pemerintah

Perencanaan merupakan tahapan pertama dalam sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah. Perencanaan yang disusun oleh suatu instansi pemerintah harus mencakup (1) Pernyataan tentang visi, misi, strategi dan factor - factor kunci keberhasilan organisasi (2) rumusan tentang tujuan, sasaran aktivitas organisasi dan (3) uraian tentang tujuan cara mencapai tujuan dan sasaran tersebut dengan memperhatikan tugas pokok dan fungsi instansi bersangkutan (adisasmita 2011:91)

Evaluasi kinerja merupakan tahapan yang dilakukan setelah pengukuran kinerja. Evaluasi kinerja dilakukan untuk memberikan penilaian terhadap hasil kerja atau prestasi kerja yang diperoleh organisasi, tim, atau individu (Wibowo, 2011:261). Analisis kinerja paling tidak dilakukan dengan cara melakukan analisis adanya beda kinerja (*Performance gap analysis*), yaitu melihat perbedaan antara yang sudah direncanakan dengan realisasi atau kenyataan. Jika terjadi *gap* yang besar, maka perlu diteliti sebab-sebabnya berikut berbagai informasi kendala dan hambatan termasuk usulan tindakan-tindakan apa yang diperlukan untuk memperbaiki kondisi tersebut (BPKP, 2011:47). Keseluruhan hasil analisis kinerja selanjutnya dituangkan dalam pelaporan akuntabilitas kinerja. Dalam evaluasi kinerja, yang harus dilakukan adalah membuat kesimpulan hasil evaluasi dan melakukan analisis pencapaian akuntabilitas kinerja.

Anwar Shah (2007:154) "Penganggaran berbasis kinerja adalah sistem anggaran yang mencerminkan input sumber daya dan output layanan untuk setiap unit organisasi. Jenis anggaran ini biasanya digunakan oleh badan-badan pemerintah untuk menunjukkan hubungan antara dana pembayar pajak dan hasil layanan yang diberikan oleh pemerintah federal, negara bagian, atau lokal".

Penganggaran berbasis kinerja adalah suatu sistem penganggaran yang menyajikan tujuan dan sasaran untuk apa dana diperlukan, biaya program yang diusulkan dan kegiatan yang terkait untuk mencapai tujuan tersebut, dan output yang diproduksi atau jasa yang diberikan menurut masing - masing program.

Anwar Shah (2007:154) "Penganggaran berbasis kinerja adalah sistem anggaran yang mencerminkan input sumber daya dan output layanan untuk setiap unit organisasi. Jenis anggaran ini biasanya digunakan oleh badan-badan pemerintah untuk menunjukkan hubungan antara dana pembayar pajak dan hasil layanan yang diberikan oleh pemerintah federal, negara bagian, atau lokal".

Penganggaran berbasis kinerja adalah suatu sistem penganggaran yang menyajikan tujuan dan sasaran untuk apa dana diperlukan, biaya program yang diusulkan dan kegiatan yang terkait untuk mencapai tujuan tersebut, dan output yang diproduksi atau jasa yang diberikan menurut masing - masing program.

Jadi menurut penulis penganggaran berbasis kinerja adalah proses pengoperasionalan rencana dalam bentuk pengkuantifikasian yang dihubungkan antara anggaran negara dengan hasil yang diinginkan dikaitkan dengan output dan outcome yang telah ditentukan, sehingga hasil atau manfaat yang

diharapkan baik oleh publik, masyarakat pembayar pajak, dikarenakan pendapatan negara berasal dari pajak rakyat.

Performance based budgeting dirancang untuk menciptakan efisiensi, efektivitas dan akuntabilitas dalam pemanfaatan anggaran belanja publik dengan output dan outcome yang jelas sesuai prioritas nasional sehingga semua anggaran yang dikeluarkan dapat dipertanggungjawabkan secara transparan kepada masyarakat luas. Penerapan metode ini juga akan meningkatkan pelayanan kepada masyarakat dan memberikan dampak yang lebih besar terhadap pelayanan kepada masyarakat. Selain itu untuk mencapai output yang telah ditentukan Kementerian/Lembaga diberikan keluasaan dalam mengelola program dan kegiatan didukung dengan adanya tingkat kepastian yang lebih tinggi atas pembiayaan untuk program dan kegiatan yang dilaksanakan.

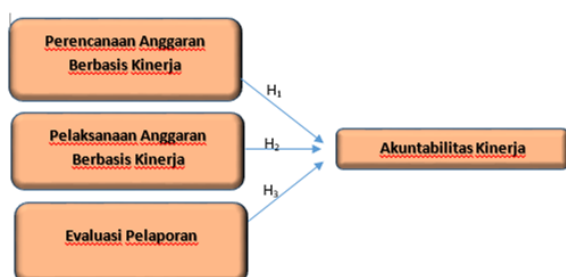
Mardiasmo (2009:4) value for money merupakan konsep pengelolaan organisasi sektor publik yang berdasarkan pada tiga elemen yaitu ekonomis, efisiensi, dan efektivitas.

Ekonomis : Perolehan input dengan kualitas dan kuantitas tertentu pada harga yang terendah. Ekonomi merupakan perbandingan input dengan output yang dinyatakan dalam satuan rupiah. Ekonomi terkait dengan sejauh mana organisasi sektor publik dapat meminimalkan input resources yang digunakan yaitu dengan menghindari pengeluaran yang boros dan tidak produktif.

Efisiensi : pencapaian output yang maksimum dengan input tertentu atau penggunaan yang terendah untuk mencapai output tertentu. Efisiensi merupakan perbandingan output/ input yang dikaitkan dengan standar kinerja atau target yang telah ditetapkan.

Efektivitas : tingkat pencapaian hasil program dengan target yang telah ditetapkan. Secara sederhana efektivitas merupakan perbandingan outcome dengan output ketiga elemen tersebut ditambah dengan keadilan dan pemerataan.

Berdasarkan teori yang telah dijelaskan, hubungan konseptual antara perencanaan anggaran berbasis kinerja dan pelaksanaan anggaran berbasis kinerja dan evaluasi pelaporan anggaran terhadap Akuntabilitas kinerja dapat dijelaskan sebagai berikut :



Gambar 2 : Kerangka Teori

Komang Sri Endrayani, Made Pradana Adisaputra, Nyoman Ari Surya Darmawan (2014) Melakukan penelitian dengan judul Pengaruh Penerapan Anggaran berbasis Kinerja terhadap Akuntabilitas Kinerja instansi Pemerintah (studi kasus pada Dinas Kehutanan Singaraja) menyimpulkan bahwa penerapan anggaran berbasis kinerja berpengaruh positif dan signifikan terhadap akuntabilitas instansi pemerintah.

H1 : Terdapat pengaruh positif dan signifikan antara penerapan anggaran berbasis kinerja terhadap akuntabilitas kinerja.

Penelitian selanjutnya oleh Kiki Kurniawan (2012) dengan judul penelitian pengaruh anggaran berbasis kinerja terhadap akuntabilitas kinerja instansi Pemerintah Daerah di wilayah IV Priangan dimana penelitian ini membuktikan pelaksanaan anggaran berbasis kinerja berpengaruh signifikan dan positif terhadap akuntabilitas kinerja instansi pemerintah

H2 : Pelaksanaan anggaran berbasis kinerja berpengaruh positif terhadap Akuntabilitas Kinerja.

Penelitian yang dilakukan oleh Jhoni Saputra (2012) dengan judul Penelitian Pengaruh Kejelasan sasaran anggaran, kinerja manajerial, dan pelaporan/ pertanggungjawaban anggaran terhadap

akuntabilitas kinerja instansi pemerintah (studi kasus pada pemerintahan provinsi Riau) menunjukkan bahwa kejelasan perencanaan anggaran berpengaruh signifikan terhadap akuntabilitas kinerja di instansi tersebut.

Dengan demikian maka perencanaan anggaran memainkan peran penting terhadap penyerapan anggaran

H3 : Ada pengaruh perencanaan anggaran terhadap akuntabilitas kinerja.

METODE PENELITIAN

Populasi dan Sampel

Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini yaitu data primer dengan metode penelitian survei menggunakan kuesioner sebagai alat pengumpul data. Populasi dalam penelitian ini adalah para perencanaan anggaran dan pelaksana anggaran serta Pengelola Keuangan pada tiap eselon II di Badan Karantina Pertanian sebanyak 124 Orang yang terdiri dari :

Sekretariat Badan	= 75 Orang
Pusat Karantina Hewan	= 16 Orang
Pusat Karantina Tumbuhan	= 15 Orang
Pusat KKIP	= 18 Orang

Dengan demikian populasi yang ada diambil sebagai objek kajian yang diteliti dan diperlakukan juga sebagai sampel. Tehnik pengambilan sampel yang digunakan dalam penelitian ini adalah rumus Slovin adalah sebagai berikut:

$$n = \frac{N}{1 + ne^2}$$

Keterangan :

n = Number of samples(jumlah sampel)

N = Total population(jumlah seluruh anggota populasi)

e = Error tolerance(toleransi terjadinya galat; taraf signifikansi; untuk sosial dan pendidikan lazimnya 0,05) -> (^2 = pangkat dua)

Dalam penelitian ini ditentukan jumlah sampel menggunakan error tolerance sebesar 5%, dengan menggunakan rumus solvin diatas maka didapatkan jumlah sampel dengan perhitungan sebagai berikut ; $124 / (1 + 124 \times 0.05^2) = 94,65$. Dari perhitungan tersebut maka di dapat jumlah sampel yang dapat mewakili populasi dibutuhkan adalah 95 pegawai.

Variabel Operasional

Variabel yang digunakan dalam terdiri Perencanaan Anggaran (Variabel X1), pelaksanaan anggaran (variable X2) dan sebagai variable bebas (independent Variabel), sedangkan akuntabilitas Kinerja (Variabel Y) yang merupakan variable terkait atau yang dipengaruhi. Pengukuran Variabel yang digunakan dalam penelitian ini adalah pengukuran dengan skala interval karena data yang diukurnya berupa interval.

Variabel Akuntabilitas Kinerja (Y)

Tabel 1. Variabel Akuntabilitas Kinerja

Variabel Penelitian	Dimensi	Indikator
Akuntabilitas Kinerja	Akuntabilitas Kejujuran	<ol style="list-style-type: none"> 1. Penghindaran penyalahgunaan jabatan 2. Bekerja sesuai prosedur yang didasari oleh peraturan hukum yang berlaku 3. Pelaksanaan Kegiatan bisa dipertanggungjawabkan
	Akuntabilitas Proses	<ol style="list-style-type: none"> 1. Melaksanakan tugas sesuai visi, misi dan tujuan yang ditetapkan 2. Kecukupan sistem informasi 3. Kecakapan dalam bekerja
	Akuntabilitas program	<ol style="list-style-type: none"> 1. Melakukan pengecekan terhadap jalannya program 2. Kegiatan/ program yang disusun telah mengakomodir setiap perubahan dan tuntutan yang ada di masyarakat 3. Membuat laporan setiap kegiatan yang telah dilaksanakan
	Akuntabilitas Kebijakan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pertanggungjawaban Pemerintah 2. Kebijakan – kebijakan pemerintah 3. Kebijakan Masyarakat
	Akuntabilitas Keuangan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Penggunaan dana publik secara ekonomis 2. Tidak ada kebocoran dana serta korupsi 3. Melakukan analisis keuangan setiap kegiatan atau program selesai dilaksanakan.

Tabel 2. Variabel Perencanaan Anggaran

Variabel Penelitian	Dimensi	Indikator
Perencanaan Anggaran	Penganggaran terpadu	<ol style="list-style-type: none"> 1. Rencana Kerja 2. Pagu Indikatif 3. Dokumen RKA-KL
	Penganggaran berbasis kinerja	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pola pengalokasi anggaran 2. Pengukuran kinerja 3. Alokasi sumber daya
	Kerangka pengeluaran jangka menengah	<ol style="list-style-type: none"> 1. Penyusunan KPJM 2. Penjabaran pengeluaran

		3. Penyusunan RKA-KL didasarkan pada program dan kegiatan serta pagu anggaran
--	--	---

Tabel 3. Variabel Pelaksanaan Anggaran

Variabel Penelitian	Dimensi	Indikator
Pelaksanaan Anggaran	Pelaksanaan Anggaran Pendapatan Negara	<ol style="list-style-type: none"> 1. Penerimaan anggaran departemen yang terjadi didalam maupun luar negeri 2. Tidak adanya pungutan diluar anggaran 3. Penetapan kebijakan besarnya pungutan
	Pelaksanaan Anggaran Belanja Negara	<ol style="list-style-type: none"> 1. Hemat, tidak mewah, efisien dan sesuai kebutuhan 2. Efektif ,terarah, dan terkendali sesuai dengan rencana 3. Mengutamakan penggunaan produksi dalam negeri

Tabel 4. Variabel Evaluasi Laporan Anggaran

Variabel Penelitian	Dimensi	Indikator
Evaluasi Pelaporan Anggaran	Pemecahan masalah	<ol style="list-style-type: none"> 1. Memiliki Basis pengetahuan yang luas dan mengikuti perkembangan 2. Mampu memecahkan masalah 3. Memiliki kepercayaan diri
	Monitoring Anggaran	<ol style="list-style-type: none"> 4. Mampu mengambil keputusan ecara efektif 5. Mampu melihat masalah dari sudut pandang yang berbeda 6. Memiliki pengetahuan yang luas 7. Mengatur pengambilan keputusan

Metode Analisis Data

Penelitian ini menggunakan Regresi Berganda dengan bantuan program SPSS 25 dalam melakukan pengolahan dan analisis data.

Persamaan Regresi yang akan diuji dalam penelitian ini yaitu:

$$AK = a + \beta_1 PA + \beta_2 RKA + \beta_3 EP + e$$

Keterangan:

- AK* = Akuntabilitas Kinerja
- PA* = Perencanaan Anggaran
- PeA* = Pelaksana Anggaran
- EP* = Evaluasi Pelaporan
- $\beta_1, \beta_2, \beta_3$ = Koefisien Regresi
- a* = Konstanta
- e* = Error

HASIL DAN PEMBAHASAN

Jumlah responden yang mengembalikan kuisisioner sebanyak 47 kuisisioner atau 37,9%. Sedangkan kuisisioner yang tidak kembali sebanyak 77 kuisisioner atau 62,1%. Pernyataan responden berdasarkan kuisisioner yang dapat diolah cukup untuk mewakili populasi. Hal ini sesuai dengan yang diusulkan Roscoe (1975) yang dikutip dari Sekaran & Bogie (2014:269) sebagai berikut: 1) ukuran sampel lebih dari 30 dan kurang dari 500 adalah tepat untuk kebanyakan penelitian. 2) Dalam penelitian multivariate ukuran sampel sebaiknya beberapa kali (lebih disukai 10 (sepuluh) kali atau lebih) lebih besar dari jumlah variable dalam studi. 3) Untuk penelitian sederhana dengan kontrol eksperimen yang ketat

Uji validitas digunakan untuk mengukur sah, atau valid tidaknya suatu kuesioner. Suatu kuesioner dikatakan valid jika pertanyaan pada kuesioner mampu untuk mengungkapkan sesuatu yang akan diukur oleh kuesioner tersebut. Teknik pengujian yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan korelasi Pearson dengan hasil sebagai berikut:

Tabel 5. Hasil Uji Validitas Variabel Perencanaan Anggaran

No	Item Pernyataan	r hitung	r tabel	Keterangan
1	PABK11	0,332	0,237	Valid
2	PABK12	0,391	0,237	Valid
3	PABK13	0,371	0,237	Valid

Sumber : Data Primer yang diolah

Tabel 6 : Hasil Uji Validitas Variabel Pelaksanaan Anggaran

No	Item Pernyataan	r hitung	r tabel	Keterangan
1	PeABK21	0,303	0,237	Valid
2	PeABK22	.0,265	0,237	Valid
3	PeABK23	0,213	0,237	Valid
4	PeABK24	0,455	0,237	Valid
5	PeABK25	0,426	0,237	Valid

Sumber: Data Primer yang diolah

Tabel 7. Hasil Uji Validitas Evaluasi Pelaporan Anggaran

No	Item Pernyataan	r hitung	r tabel	Keterangan
1	EP31	0,253	0,237	Valid
2	EP33	0,369	0,237	Valid
3	EP34	0,458	0,237	Valid
4	EP35	0,469	0,237	Valid
5	EP36	0,603	0,237	Valid
6	EP37	0,394	0,237	Valid

Sumber : Data Primer yang diolah

Tabel 8. Hasil Uji Validitas Akuntabilitas Kinerja

1	AK11	0,334	0,237	Valid
2	AK12	0,400	0,237	Valid
3	AK13	0,435	0,237	Valid
4	AK14	0,428	0,237	Valid
5	AK15	0,482	0,237	Valid

Sumber : Data Primer yang diolah

Suatu kuesioner dianggap reliabel jika nilai Cronbach Alpha ≥ 0.600 . Hasil pengujian reliabilitas pada penelitian ini dapat dilihat pada tabel sebagai berikut:

Tabel 9. Hasil Uji Reliabilitas

Cronbach's Alpha	N of Items
.800	20

Dari table output di atas diketahui ada N of Item (banyaknya item atau butir pernyataan kuisisioner) ada 20 buah item dengan nilai Cronbach alpha sebesar $0,800 > 0,600$, maka sebagaimana dasar pengambilan keputusan dalam uji reliabilitas diatas dapat disimpulkan bahwa ke 20 (dua puluh) atau semua item pernyataan kuisisioner untuk variabel Perencanaan anggaran berbasis kinerja dan Pelaksanaan anggaran berbasis kinerja dan evaluasi pelaporan terhadap Akuntabilitas Kinerja adalah reliabel atau handal.

PENGUJIAN HIPOTESIS

Tabel 10. Hasil Pengujian Hipotesis

		Coefficients ^a				
		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.
Model		B	Std. Error	Beta		
1	(Constant)	4.732	3.616		1.309	.198
	PA	.030	.205	.020	.146	.885
	PeA	.313	.167	.258	1.869	.068
	EP	.377	.123	.432	3.056	.004

a. Dependent Variable: AK

Hasil Uji Pengaruh Perencanaan Anggaran Berbasis Kinerja (X1) Terhadap Akuntabilitas Kinerja (Y):

H_1 = Perencanaan Anggaran berpengaruh terhadap Akuntabilitas Kinerja.

Berdasarkan perhitungan statistik pada tabel 6 menunjukkan bahwa t hitung variabel Perencanaan Anggaran sebesar 0,146 lebih kecil daripada t tabel sebesar 1,684 pada tingkat signifikansi 0,05 atau memiliki nilai p value sebesar 0.885 yang lebih besar dari 0,05. Hal ini menunjukkan bahwa Perencanaan Anggaran tidak berpengaruh signifikan terhadap Akuntabilitas Kinerja. Nilai koefisien regresi yang positif 0,030 menunjukkan bahwa Perencanaan Anggaran tidak berpengaruh terhadap Akuntabilitas Kinerja di Badan Karantina Pertanian.

Tidak ada pengaruh dalam perencanaan anggaran terhadap akuntabilitas kinerja disebabkan terdapat permasalahan yang dihadapi selama ini yaitu perencanaan anggaran sebagian yang di susun oleh staf

direktorat yang tidak faham atau bukan tenaga perencana anggaran sehingga revisi anggaran yang dilakukan berulang kali menyebabkan pelaksanaan anggaran tersendat.

Hasil Uji Pengaruh Pelaksanaan Anggaran Berbasis Kinerja (X2) Terhadap Akuntabilitas Kinerja (Y)

H_2 = Pelaksanaan Anggaran berpengaruh terhadap Akuntabilitas Kinerja.

Berdasarkan perhitungan statistik pada tabel 6 menunjukkan bahwa t hitung variabel Pelaksanaan Anggaran sebesar 1,869 lebih besar daripada t tabel sebesar 1,684 pada tingkat signifikansi 0,05 atau memiliki nilai p value (0,068) yang lebih besar dari 0,05. Hal ini menunjukkan bahwa Pelaksanaan Anggaran berpengaruh signifikan terhadap Akuntabilitas Kinerja. Nilai koefisien regresi (beta) yang positif (0,313) menunjukkan bahwa Pelaksanaan Anggaran tidak berpengaruh terhadap Akuntabilitas Kinerja

Adanya pengaruh pelaksanaan anggaran terhadap akuntabilitas kinerja. Hal ini membuktikan semakin baik pelaksanaan anggaran maka akan semakin baik akuntabilitas kinerja sehingga output yang ingin dicapai akan tercapai dengan baik. Permasalahan yang dihadapi selama ini adalah pelaksanaan anggaran yang kurang memahami sistem keuangan pemerintah, prosedur dan mekanisme pengadaan yang selalu berubah, dan peraturan pemerintah yang selalu berubah di pertengahan tahun anggaran berjalan.

Hasil Uji Pengaruh Evaluasi Pelaporan (X3) Terhadap Akuntabilitas Kinerja (Y)

H_3 = Evaluasi Kinerja berpengaruh terhadap Akuntabilitas Kinerja.

Berdasarkan perhitungan statistik pada tabel 6. menunjukkan bahwa t hitung variabel Evaluasi Kinerja sebesar 3,056 lebih besar daripada t tabel sebesar 1,684 pada tingkat signifikansi 0,05 atau memiliki nilai p value (0,004) yang lebih besar dari 0,05. Hal ini menunjukkan bahwa Evaluasi Kinerja berpengaruh signifikan terhadap Akuntabilitas Kinerja. Nilai koefisien regresi (beta) yang positif (0,377) mengandung arti bahwa setiap kenaikan variabel Evaluasi Kinerja satu satuan maka variabel Akuntabilitas Kinerja akan naik sebesar 0,377

Adanya pengaruh Evaluasi pelaporan terhadap akuntabilitas kinerja. Hal ini membuktikan semakin baik Evaluasi Pelaporan maka akan semakin baik akuntabilitas kinerja sehingga output yang ingin dicapai akan tercapai dengan baik

KESIMPULAN DAN SARAN

Berdasarkan hasil analisis data yang telah diuraikan pada bab sebelumnya, maka dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Tidak ada pengaruh dalam perencanaan anggaran terhadap akuntabilitas kinerja disebabkan terdapat permasalahan yang dihadapi selama ini yaitu perencanaan anggaran sebagian yang di susun oleh staf direktorat yang tidak faham atau bukan tenaga perencana anggaran sehingga revisi anggaran yang dilakukan berulang kali menyebabkan pelaksanaan anggaran tersendat.
2. Adanya pengaruh pelaksanaan anggaran terhadap akuntabilitas kinerja. Hal ini membuktikan semakin baik pelaksanaan anggaran maka akan semakin baik akuntabilitas kinerja sehingga output yang ingin dicapai akan tercapai dengan baik. Permasalahan yang dihadapi selama ini adalah pelaksanaan anggaran yang kurang memahami sistem keuangan pemerintah, prosedur dan mekanisme pengadaan yang selalu berubah, dan peraturan pemerintah yang selalu berubah di pertengahan tahun anggaran berjalan.

3. Adanya pengaruh Evaluasi pelaporan terhadap akuntabilitas kinerja. Hal ini membuktikan semakin baik Evaluasi Pelaporan maka akan semakin baik akuntabilitas kinerja sehingga output yang ingin dicapai akan tercapai dengan baik.

Saran

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan, maka peneliti dapat memberikan saran – saran sebagai berikut :

1. Perencanaan anggaran pemerintah sebaiknya lebih mengutamakan membuat program atau kegiatan yang lebih bermanfaat untuk kesejahteraan masyarakat.
2. Pelaksanaan anggaran Pemerintah sebaiknya lebih memonitoring pelaksanaan program/kegiatan seberapa jauh pelaksanaannya dan memperbaiki sistem akuntansi keuangan dalam hal pencatatan penggunaan anggaran.
3. Bagi peneliti selanjutnya yang tertarik untuk meneliti masalah yang sama, dianjurkan meneliti pada subjek yang lain, dengan variabel – variabel lain yang berpengaruh terhadap akuntabilitas kinerja instansi pemerintah dan bisa mengambil sampel yang lebih luas.

Keterbatasan

1. Penelitian ini hanya membahas 3 (tiga) variabel independen yang berhubungan dengan penerapan anggaran berbasis kinerja. Variabel lain diabaikan dan dianggap tidak mempunyai pengaruh terhadap akuntabilitas kinerja instansi pemerintah.
2. Disebabkan oleh keterbatasan waktu dan tenaga, penelitian ini hanya meneliti pada Badan Karantina Pertanian sehingga hasilnya hanya mencerminkan kondisi yang ada pada Badan Karantina Pertanian tersebut dan tidak dapat digeneralisasi pada semua keadaan.
3. Instrumen yang digunakan dalam penelitian ini adalah persepsi jawaban melalui kuesioner yang diberikan sehingga kadang timbul perbedaan interpretasi atas maksud dan tujuan pernyataan.

DAFTAR PUSTAKA

- Adisasmita, Rahardjo. 2011. Manajemen Pemerintah Daerah. Penerbit Graha Ilmu, Yogyakarta.
- Anwar Shah, 2007. Budgeting and Budgetary Institution. Edisi 2007. World Bank, Washinton DC
- Arfan Ikhsan Lubis, 2009. Akuntansi Keperilakuan. Edisi Kedua. Salemba Empat, Jakarta
- Arikunto, Suharsimi. 2010. Anggaran Perusahaan. Rineka Cipta, Jakarta
- Badan Pemeriksa Keuangan Pemerinta, 2011. Laporan Akuntabilitas Pusdiklatwas BPKP Tahun 2011 . BPKP, Bogor
- Badan Pemeriksa Keuangan Pemerintah, 2011. Laporan Kinerja Instansi Pemerintah. BPKP, Jakarta
- Bastian, Indra, 2010. Akuntansi Sektor Publik : Suatu Pengantar. Edisi Ketiga. Penerbit Erlangga, Jakarta.
- Dunn, William N, 2003. Pengantar Analisis Kebijakan Publik. UGM Press, Yogyakarta
- Edy Supriyadi Dr.Ir.MBA, 2014. SPSS + Amos. Penerbit In Media, Jakarta
- Ellwood, Sheila, 1993. Parish town and Councils : Financial Accountability and Management. Local Governmen Studies, Vol 9
- Hasibuan Malayu. 2002. Manajemen Sumber Daya Manusia. Bumi Aksara. Jakarta
- Imam Ghozali, Prof. Dr. M.Com. Akt, 2016. Aplikasi Analisis MULTIVARIETE dengan Program IBM SPSS 23. Edisi kedelapan. Badan Penerbit UNDIP, Semarang

- Jhony Saputra, 2012. Penelitian Pengaruh Kejelasan sasaran anggaran, kinerja manajerial, dan pelaporan/ pertanggungjawaban anggaran terhadap akuntabilitas kinerja instansi pemerintah (studi kasus pada pemerintahan provinsi Riau). E-journal FE UMRAH, RIAU
- Kiki, Kurniawan, dll, 2012. Pengaruh Penganggaran Berbasis Kinerja Terhadap Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Daerah di Wilayah IV Priangan. E-journal Universitas Pendidikan Indonesia, Bandung.
- Komang Sri E, I Made Pradana, dll, 2014. Pengaruh Penerapan Anggaran Berbasis Kinerja Terhadap Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (Studi Kasus pada Dinas Kehutanan UPT KPH Bali Tengah Kota Singaraja). E-Journal S1 AK Universitas Pendidikan Ganesha, Singaraja
- LAN dan BPKP, 2003. Pedoman Penyusunan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah. LAN RI, Jakarta
- Mardiasmo, 2002. Akuntansi Sektor Publik Daerah. Penerbit ANDI, Yogyakarta
- Munandar, M. 2007. Budgeting, Perencanaan Kerja Pengkoordinasian Kerja Pengawasan Kerja. Edisi Kedua. BPFE Universitas Gajah Mada, Yogyakarta
- Penny Kusumastuti Lukito, 2014. Membumikan transportasi dan akuntabilitas kinerja sektor publik. Penerbit PT Gramedia Widiasarana Indonesia, Jakarta.
- Peraturan Menteri, 2014. Peraturan menteri Pendayagunaan Aparatur Pemerintah No 53 Tahun 2014. Tentang Petunjuk Teknik Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Riviui atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah. Jakarta.
- Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2004. Tentang Penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian Negara/Lembaga
- Prawirosentono, 2001. Manajemen Operasi, analisis dan studi kasus. Edisi ketiga. Bumi Aksara, Jakarta.
- SK Kepala Lembaga Administrasi No. 239/IX/6/8/2003 Tanggal 2003. Tentang Pedoman Penyusunan dan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Pemerintah dalam Pelaksanaan Akuntabilitas di Lingkungan Instansi Pemerintah. LAN RI, Jakarta.
- Thomas Woodrow Wilson. (1903). The state.
- Undang-Undang RI, 2003. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2003. Tentang Keuangan Negara. UU-RI, Jakarta
- United Nations, 1996. United Nations Commision on Human Settle.
- Wibowo. 2011. Manajemen Kinerja. Edisi Ketiga. Penerbit Rajawali Pers, Jakarta